

# Effective Elementary School Financing Management

Ilham Suriadi<sup>1</sup>, Hamdi Abdul Karim<sup>2</sup>, Nasrin Hasibuan<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

\*Email: [ilhamsuriadi30@gmail.com](mailto:ilhamsuriadi30@gmail.com)

## Abstract

The phenomenon of low effectiveness of education funding management in various elementary schools remains a crucial issue in Indonesian education, particularly in terms of accountability, transparency, and integration between budget planning and implementation. This condition results in less than optimal utilization of funds to support improvements in the quality of education services and student learning outcomes. This study aims to examine in-depth aspects of effective elementary school funding management, starting from the sources and types of funding, budget planning strategies, and its impact on education quality. The method used is library research by reviewing various literature, government regulations, and the results of relevant previous research. The results show that participatory, transparent, and performance-based funding management has been proven to increase the efficiency of fund use, encourage the creation of higher-quality education programs, and strengthen public accountability for elementary school financial management. These findings emphasize the importance of strengthening the managerial capacity of school principals and involving all stakeholders in the education budget planning and evaluation process.

**Keywords:** Financing Management, Elementary Schools, RKAS, BOS Funds, Education Quality.



Licenses may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia, pendidikan dasar memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi tahap awal pembentukan karakter, pengetahuan, dan keterampilan anak. Sekolah dasar, sebagai institusi formal pertama yang dilewati oleh peserta didik, membutuhkan pengelolaan yang profesional agar proses pembelajaran berjalan optimal. Salah satu aspek krusial dalam keberlangsungan dan efektivitas pengelolaan sekolah dasar adalah manajemen pembiayaan. Pembiayaan yang efektif, terencana, dan transparan menjadi penopang utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan berkelanjutan.

Manajemen pembiayaan sekolah dasar mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, pembiayaan pendidikan tidak hanya bersumber dari pemerintah melalui program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi juga dapat berasal dari masyarakat, donatur, hingga lembaga swasta. Oleh karena itu, pengelolaan dana yang tepat dan efektif menjadi keharusan agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional (Mulyasa, 2004).

Efektivitas manajemen pembiayaan di sekolah dasar tidak dapat dilepaskan dari tiga prinsip utama: efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi. Efisiensi berarti setiap dana yang dialokasikan digunakan secara hemat, namun tidak mengurangi kualitas pembelajaran. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada stakeholder,

termasuk orang tua murid dan pemerintah. Sementara itu, partisipasi merujuk pada pelibatan berbagai pihak, seperti komite sekolah dan masyarakat, dalam merumuskan dan mengawasi penggunaan anggaran (Pananrangi, 2017). Sayangnya, di banyak sekolah dasar, terutama di daerah-daerah terpencil, masih dijumpai berbagai kendala dalam manajemen pembiayaan. Mulai dari keterbatasan kapasitas kepala sekolah dan bendahara dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), ketidakpahaman terhadap regulasi yang berlaku, hingga rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Akibatnya, pengelolaan keuangan sering kali tidak optimal, bahkan rawan penyimpangan (Pontoh et al., 2017).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang besar untuk meningkatkan efektivitas manajemen pembiayaan. Dengan sistem informasi manajemen sekolah (SIMSekolah) atau aplikasi keuangan berbasis daring, sekolah dapat mengelola dana secara lebih transparan dan mudah diakses oleh seluruh pihak terkait. Hal ini sekaligus menjadi bentuk inovasi dalam tata kelola pendidikan yang mendorong akuntabilitas dan partisipasi publik lebih luas (Prihanarko & Hidayati, 2023). Manajemen pembiayaan yang efektif juga berimplikasi langsung terhadap mutu pendidikan di sekolah dasar. Dana yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana belajar, peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, serta pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung penguatan karakter siswa. Dengan demikian, manajemen pembiayaan bukan hanya soal teknis keuangan, melainkan menjadi bagian integral dari strategi peningkatan mutu pendidikan secara holistik (Mesiono & Haidir, 2020).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong transparansi dan efektivitas pembiayaan sekolah, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Dalam regulasi tersebut ditegaskan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan sekolah, pelaporan keuangan yang tepat waktu, serta audit berkala. Namun, implementasi kebijakan ini masih menemui tantangan, terutama dari sisi kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung (Saifrizal & Yusuf, 2023). Untuk itu, diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas manajerial kepala sekolah, bendahara, dan seluruh pemangku kepentingan di sekolah dasar. Pelatihan rutin, pendampingan oleh dinas pendidikan, serta evaluasi berkala terhadap kinerja keuangan sekolah menjadi langkah strategis yang perlu terus digencarkan. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal sangat penting agar manajemen pembiayaan dapat berlangsung secara profesional dan bebas dari praktik-praktik koruptif (Nurhalimah et al., 2024).

Penelitian tentang manajemen pembiayaan sekolah dasar menjadi sangat relevan untuk dilakukan, terutama dalam menggali faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitasnya. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi perumus kebijakan pendidikan, praktisi sekolah, serta masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Dengan pengelolaan pembiayaan yang efektif, diharapkan mutu pendidikan dasar di Indonesia akan semakin meningkat dan mampu melahirkan generasi unggul yang berdaya saing di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus kajian ini adalah bagaimana manajemen pembiayaan yang efektif di sekolah dasar dapat dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara menyeluruh. Penelitian ini juga ingin mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengelola pembiayaan serta solusi strategis untuk mengatasinya. Diharapkan, kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi inspirasi praktis bagi pengelola sekolah dasar di seluruh Indonesia.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi literatur, yakni dengan menelaah, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber referensi ilmiah yang relevan, seperti jurnal nasional dan internasional, buku-buku akademik, dokumen kebijakan pendidikan, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang manajemen pembiayaan sekolah dasar yang efektif. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data seperti Google Scholar, Garuda, dan Perpustakaan

Nasional, dengan kata kunci antara lain: "manajemen pembiayaan sekolah", "efektivitas pengelolaan dana BOS", dan "tata kelola keuangan pendidikan dasar". Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, strategi implementasi, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas manajemen pembiayaan di sekolah dasar. Studi ini bertujuan untuk merumuskan kerangka teoritis dan praktik terbaik (best practices) yang dapat menjadi acuan bagi para pengelola sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil**

#### **a. Konsep Dasar Manajemen Pembiayaan Sekolah Dasar**

##### **1) Pengertian Manajemen Pembiayaan Sekolah**

Manajemen pembiayaan sekolah merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem manajemen pendidikan yang berfokus pada pengelolaan keuangan sekolah secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam konteks sekolah dasar, manajemen pembiayaan berfungsi untuk menjamin ketersediaan dan penggunaan sumber dana secara efektif dan efisien guna mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Menurut Mulyasa, (2003), manajemen pembiayaan pendidikan adalah suatu upaya mengatur segala bentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan agar dapat digunakan secara optimal. Sementara itu, menurut Sianturi et al., (2024), manajemen pembiayaan sekolah adalah proses sistematis dalam mengelola keuangan sekolah untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pengelolaan dana sekolah bukan hanya sebatas administrasi keuangan, melainkan mencakup pengambilan keputusan strategis yang berhubungan langsung dengan mutu pendidikan dan kesejahteraan warga sekolah. Keberhasilan manajemen pembiayaan menjadi indikator penting dalam mewujudkan efisiensi penggunaan dana dan peningkatan kualitas hasil belajar siswa.

##### **2) Tujuan Manajemen Pembiayaan Sekolah Dasar**

Tujuan utama manajemen pembiayaan sekolah dasar adalah menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam praktiknya, tujuan ini diterjemahkan dalam beberapa aspek berikut (Budaya, 2017): a) Menjamin ketersediaan dana pendidikan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan; b) Mengalokasikan dana berdasarkan prioritas kebutuhan sekolah; c) Menghindari pemborosan anggaran melalui prinsip efisiensi; d) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui pemanfaatan dana yang efektif; e) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan sekolah melalui transparansi dan akuntabilitas.

Di samping itu, manajemen pembiayaan juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua dalam mendukung kebutuhan finansial sekolah secara kolektif.

##### **3) Prinsip-Prinsip Dasar dalam Manajemen Pembiayaan**

Untuk menjalankan fungsi manajemen pembiayaan secara optimal, diperlukan prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan landasan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: a) Efisiensi adalah dana yang tersedia harus digunakan secara hemat dan tepat sasaran tanpa mengurangi mutu pendidikan; b) Efektivitas adalah dana harus memberikan hasil maksimal dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan; c) Transparansi adalah seluruh kegiatan keuangan harus dapat diketahui oleh pemangku kepentingan, termasuk guru, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Akuntabilitas adalah setiap pengeluaran dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral.

- a. Partisipatif adalah perencanaan dan penggunaan dana harus melibatkan berbagai pihak, tidak hanya kepala sekolah dan bendahara, tetapi juga guru dan komite sekolah.
- b. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat memperkuat tata kelola keuangan sekolah yang baik (good school governance), serta menghindari penyimpangan yang dapat merugikan pihak manapun.

#### **b. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan di Sekolah Dasar**

Manajemen pembiayaan sekolah dasar mencakup seluruh tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Secara garis besar, ruang lingkup manajemen pembiayaan meliputi (Adriansyah & Maftuhah, 2023):

##### 1) Perencanaan Pembiayaan

Perencanaan keuangan adalah tahap awal yang sangat penting dalam manajemen pembiayaan. Sekolah harus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun ajaran baru. Perencanaan ini disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas kegiatan pendidikan. Dalam proses ini, sekolah diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar terjadi sinergi antara kebutuhan sekolah dan dukungan masyarakat.

##### 2) Pengorganisasian Dana

Pengorganisasian dana mencakup penunjukan tim pengelola keuangan sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan perwakilan komite. Tim ini bertanggung jawab dalam mengelola arus masuk dan keluar dana, serta menyusun sistem pencatatan keuangan yang akurat.

##### 3) Pelaksanaan Penggunaan Dana

Setelah anggaran disetujui, pelaksanaan pembiayaan dilakukan sesuai dengan RKAS. Penggunaan dana harus memperhatikan waktu pencairan dan mekanisme belanja, agar kegiatan pembelajaran tidak terganggu karena keterlambatan dana. Kegiatan yang dibiayai meliputi operasional sekolah, pengadaan sarana, pembayaran honor guru, pelatihan, dan kegiatan pendukung lainnya.

##### 4) Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai perencanaan. Evaluasi terhadap pengelolaan dana dilakukan melalui audit internal dan eksternal, termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak dinas pendidikan dan masyarakat.

##### 5) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Seluruh kegiatan pembiayaan harus disertai pelaporan keuangan secara berkala. Pelaporan ini menjadi bukti akuntabilitas sekolah dalam mengelola keuangan, serta sebagai dasar untuk perencanaan anggaran di tahun berikutnya. Laporan keuangan sekolah yang baik mencerminkan transparansi dan tanggung jawab terhadap dana publik.

#### **c. Sumber dan Jenis Pembiayaan Sekolah Dasar**

Pembiayaan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem manajemen pendidikan. Dalam konteks sekolah dasar, pengelolaan pembiayaan yang efektif sangat menentukan kelancaran proses pendidikan serta pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu dipahami berbagai sumber dan jenis pembiayaan yang digunakan serta bagaimana distribusi anggarannya mengakomodasi kebutuhan riil sekolah.

##### 1) Sumber Dana Pendidikan Sekolah Dasar

Pengelolaan keuangan sekolah dasar harus bersumber dari dana yang legal, terencana, dan tepat guna. Adapun sumber-sumber pembiayaan pendidikan dasar secara umum meliputi (Matin, 2014):

###### a) Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui pemerintah daerah. Dana ini ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional non-personalia di sekolah. BOS menjadi tulang punggung pembiayaan operasional di sekolah dasar negeri. Penggunaan dana BOS mencakup berbagai kebutuhan, seperti pembelian alat tulis, perawatan fasilitas, pembayaran gaji guru honorer, pengembangan perpustakaan, serta kegiatan ekstrakurikuler. Namun, dana BOS tidak mencakup kebutuhan pembangunan fisik besar (investasi).

b) Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Dana ini merupakan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Dana APBD dapat digunakan untuk pembangunan fisik, pengadaan sarana-prasarana, atau menutup kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi melalui BOS. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah dasar, khususnya yang tidak tercakup oleh dana BOS, seperti pembangunan ruang kelas baru, renovasi fasilitas, dan penyediaan laboratorium atau media pembelajaran.

c) Sumbangan Masyarakat

Sumbangan dari orang tua atau masyarakat sekitar merupakan sumber alternatif yang legal, sepanjang bersifat sukarela, tidak memaksa, dan sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Sumbangan ini biasanya digunakan untuk kebutuhan mendesak atau pendukung kegiatan sekolah, seperti kegiatan sosial, lomba, atau pembangunan tambahan fasilitas.

d) Sumber Swadaya Lainnya

Beberapa sekolah dasar juga dapat memperoleh dana dari kegiatan produktif, kerja sama dengan pihak swasta, alumni, atau lembaga non-pemerintah. Meski kontribusinya tidak sebesar BOS atau APBD, sumber ini sangat penting dalam mendukung kreativitas sekolah.

2) Klasifikasi Pembiayaan Pendidikan

Secara umum, pembiayaan pendidikan di sekolah dasar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar (Papilaya, 2022):

a. Pembiayaan Rutin (Operasional)

Pembiayaan operasional adalah dana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan harian sekolah. Ini mencakup:

- Gaji guru dan tenaga kependidikan non-PNS
- Pengadaan alat tulis kantor (ATK)
- Pembayaran listrik, air, dan internet
- Biaya pemeliharaan dan perawatan fasilitas
- Kegiatan belajar mengajar dan administrasi

Jenis pembiayaan ini bersifat reguler dan harus terus tersedia untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar setiap hari.

Pembiayaan Pengembangan (Investasi)

b. Pembiayaan investasi adalah dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas sekolah. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- Pembangunan ruang kelas baru
- Renovasi gedung
- Pengadaan laboratorium atau sarana TIK
- Pengembangan kurikulum dan pelatihan guru

Investasi bersifat jangka panjang dan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas pelayanan pendidikan.

3) Analisis Efektivitas Distribusi Anggaran

Pengelolaan anggaran pendidikan di sekolah dasar harus berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, tantangan yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kebutuhan riil sekolah (Banding, 2024).

a. Kesesuaian Perencanaan dan Realisasi Anggaran

Seringkali perencanaan anggaran tidak mencerminkan kebutuhan aktual sekolah. Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan alat peraga justru dialokasikan untuk kegiatan seremonial. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan berbasis kebutuhan (need-based budgeting) dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

b. Evaluasi Efektivitas Dana BOS

Meski dana BOS merupakan dana utama untuk operasional sekolah, penggunaannya kerap belum maksimal. Beberapa kepala sekolah atau bendahara kesulitan menyusun pelaporan secara akurat, yang mengakibatkan pemborosan atau penggunaan dana yang tidak prioritas. Evaluasi tahunan dan pelibatan komite sekolah dalam perencanaan serta pelaporan menjadi solusi agar anggaran digunakan secara tepat sasaran.

c. Penyelarasan Antara Dana APBD dan Kebutuhan Infrastruktur

Dana APBD harus diarahkan pada pembangunan yang benar-benar dibutuhkan sekolah, seperti perbaikan toilet, pembangunan ruang kelas rusak, atau penyediaan air bersih. Pemerintah daerah perlu melakukan survei langsung ke sekolah untuk memahami kondisi riil yang dihadapi.

Pengelolaan pembiayaan sekolah dasar yang efektif mensyaratkan pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber dana, jenis pembiayaan, dan bagaimana dana tersebut didistribusikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Keseimbangan antara operasional dan investasi, serta keterlibatan semua pemangku kepentingan (stakeholders), adalah kunci untuk menjamin efektivitas penggunaan dana pendidikan. Agar sistem pembiayaan dapat berjalan optimal, sekolah harus memiliki perencanaan anggaran yang matang, transparan, dan disusun berdasarkan analisis kebutuhan aktual. Selain itu, penguatan kapasitas manajerial kepala sekolah dan bendahara juga menjadi faktor pendukung penting agar pembiayaan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dasar.

**d. Strategi Efektif dalam Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran**

Pengelolaan anggaran pendidikan pada satuan pendidikan dasar seperti Sekolah Dasar (SD) merupakan aspek strategis dalam menciptakan layanan pendidikan yang bermutu. Agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran, diperlukan strategi perencanaan dan pengelolaan yang efektif. Tiga prinsip utama dalam strategi ini meliputi: perencanaan partisipatif dan akuntabel, penerapan prinsip transparansi dan efisiensi, serta implementasi sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja.

1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara Partisipatif dan Akuntabel

RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjadi panduan pelaksanaan program dan pengeluaran dana sekolah. RKAS wajib disusun berdasarkan kebutuhan nyata sekolah dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (Yohana, 2023).

2. Penyusunan Secara Partisipatif

Partisipasi dalam penyusunan RKAS mencerminkan pelibatan berbagai pihak yang terkait dengan ekosistem pendidikan di sekolah, seperti:

- Kepala sekolah dan guru
- Komite sekolah
- Orang tua peserta didik
- Perwakilan peserta didik (di tingkat SD kelas tinggi)

Pelibatan pihak-pihak tersebut memungkinkan identifikasi kebutuhan yang lebih akurat, serta menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program yang akan dilaksanakan.

### 3. Akuntabilitas dalam Penyusunan RKAS

Akuntabilitas berarti bahwa perencanaan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, legal, dan moral. Hal ini mencakup:

- Pencantuman program berdasarkan prioritas kebutuhan
- Kesesuaian anggaran dengan harga pasar
- Ketersediaan dokumen pendukung seperti Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan laporan evaluasi tahun sebelumnya

RKAS juga harus disahkan oleh Dinas Pendidikan atau otoritas yang berwenang sebelum pelaksanaan agar memiliki kekuatan hukum dalam pelaporan penggunaan anggaran.

Prinsip Transparansi, Efisiensi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah. Dalam konteks manajemen keuangan sekolah, tiga prinsip dasar yang harus diterapkan adalah transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Ketiganya saling terkait dan menjadi pondasi dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi Pendidikan (Nisa et al., 2024).

#### a. Transparansi Keuangan

Transparansi berarti bahwa informasi keuangan sekolah terbuka dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Bentuk transparansi di antaranya:

- Pengumuman RKAS dan realisasi anggaran melalui papan pengumuman sekolah
- Pelaporan berkala kepada komite sekolah dan wali murid
- Penggunaan aplikasi digital (jika memungkinkan) untuk pelacakan anggaran

#### b. Efisiensi dalam Penggunaan Dana

Efisiensi berarti bahwa setiap dana yang digunakan memberikan hasil optimal dengan biaya seminimal mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Contoh strategi efisiensi meliputi:

- Pembelian barang dan jasa melalui proses pembandingan harga
- Pengutamaan kebutuhan prioritas seperti alat belajar dan perawatan ruang kelas
- Pemanfaatan sumber daya lokal seperti tenaga kerja masyarakat sekitar

#### c. Akuntabilitas Pengelolaan

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan melibatkan pertanggungjawaban kepala sekolah dan bendahara atas setiap kegiatan dan pengeluaran. Laporan keuangan harus disusun sesuai standar dan dikaji dalam rapat evaluasi rutin. Audit internal dan eksternal menjadi bagian penting dari pengawasan terhadap praktik keuangan sekolah.

Strategi efektif dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran sekolah dasar melibatkan perencanaan partisipatif, prinsip tata kelola yang baik, serta penerapan sistem evaluasi berbasis kinerja. Keberhasilan dalam mengelola anggaran pendidikan bukan hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi lebih jauh dari sejauh mana anggaran tersebut dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, sekolah dasar tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga mampu menjadi lembaga publik yang transparan, profesional, dan dipercaya masyarakat dalam menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.

## 2. Discussions

Manajemen pembiayaan yang efektif di sekolah dasar memegang peranan penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Temuan dari studi pustaka ini menegaskan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berbasis kinerja dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta memperkuat akuntabilitas publik. Strategi perencanaan anggaran yang terintegrasi dengan pelaksanaan dan evaluasi menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana pendidikan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial kepala sekolah serta pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang akuntabel dan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dan capaian belajar siswa.

## Daftar Rujukan

- Adriansyah, H., & Maftuhah, M. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 1–24.
- Banding, M. P. (2024). *Meningkatkan Kinerja Sekolah Melalui Dana Bos: Analisis Efektivitas*. Mega Press Nusantara.
- Budaya, B. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar yang efektif. *Likhitaprajna*, 18(1), 42–59.
- Matin, M. (2014). Manajemen pembiayaan pendidikan konsep dan aplikasinya. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Mesiono, M., & Haidir, H. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Hikmah*, 17(2), 61–73.
- Mulyasa, E. (2003). *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen berbasis sekolah: konsep, strategi dan implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Nisa, V., Rachmawati, A. A., Janah, E. U., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis Prinsip Akuntabilitas Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Sekolah. *Refleksi: Jurnal Riset Dan Pendidikan*, 2(2), 69–82.
- Nurhalimah, N., Darmiyanti, A., & Rukajat, A. (2024). Strategi Kepala Sekolah dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTs Mathla'ul Huda Cikande Karawang. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 375–380.
- Pananrangi, A. R. (2017). *Manajemen pendidikan* (Vol. 1). Celebes media perkasa.
- Papilaya, J. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. CV. Azka Pustaka.
- Pontoh, J., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada satuan pendidikan dasar di Kota Kotamobagu. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).
- Prihanarko, A., & Hidayati, D. (2023). Pemanfaatan Sistem Informasi Pada Manajemen Pembiayaan Sekolah. *Manajemen Pendidikan*, 18(1).
- Saifrizal, M., & Yusuf, Y. (2023). Pengelolaan Keuangan Dana Bos Reguler dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 3(2), 1039–1047.
- Sianturi, R., Sutisna, A., Dalia, A., Kurniawan, A. C., Dewi, A. V., Mardiana, C., Danial, D. S. R., Taopik, D., & Darlianti, E. (2024). *Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Teknik*. Edu Publisher.
- Yohana, Y. (2023). Efektivitas Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dalam Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Kota Mataram. *TIRAI EDUKASI: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 196–210.